

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Geografi adalah studi yang menjelaskan sifat bumi, yang dapat dilakukan analisis terhadap gejala alam dan penduduk, mempelajari corak khas tentang kehidupan yang berusaha mencari fungsi dari unsur bumi yang berada dalam ruang dan waktu (Bintarto, 1977). Geografi tidak hanya mempelajari tentang fisik dan lingkungan tetapi tentang geografi manusia. Salah satu cabang ilmu geografi manusia adalah geografi politik. Geografi politik merupakan salah satu cabang ilmu geografi yang berhubungan dengan kehidupan manusia (*antroposfer*). Geografi Politik merupakan aspek geografi manusia yang dapat memberikan fokus kepada unit-unit politik dan fenomena politik yang menumpukan perhatian kepada struktur institusi itu dijalankan dan bagaimana institusi itu terlibat dalam pembentukan corak dan hubungan geografi (Besar dan Mohd, 2015). Penjelasan di atas menunjukkan bahwa ilmu geografi memiliki peranan penting di dalam politik.

Pemilihan umum (Pemilu) yang di dalamnya terdapat pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan bahasan dari geografi politik. Secara aplikatif geografi dapat memberikan informasi spasial dan distribusi keruangan sebaran kantong suara dari setiap pasangan calon kepala daerah. Sehingga kajian geografi politik dapat membantu menyajikan data spasial dari hasil pemilihan kepala daerah di suatu wilayah. Dalam pemilihan kepala daerah distribusi sebaran kantong suara pasangan calon kepala daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan dapat menentukan objek kajian yang sah dalam geografi politik. Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemilihan umum kepala daerah secara langsung di beberapa daerah di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2005.

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Menurut UU No. 38 Tahun 2003 Tanggal 18 Desember 2003, Kabupaten Pasaman Barat dibentuk dari hasil pemekaran

Kabupaten Pasaman dengan ibu kota kabupaten di Simpang Ampek. Menurut UU No. 38 Tahun 2003, dalam sejarah pembentukannya, Kabupaten Pasaman Barat awalnya terdiri dari 7 Kecamatan, Kecamatan Sungai Beremas, Ranah Batahan, Lembah Melintang, Gunung Tuleh, Pasaman, Kinali dan Talamau. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2003, pada wilayah Kabupaten Pasaman Barat terjadi penambahan 4 kecamatan baru, yaitu: Kecamatan Koto Balingka, Sungai Aur, Sasak Ranah Pasisie, dan Luhak Nan Duo. Terhitung sejak peresmian pada tanggal 7 Januari 2004 sampai 7 Januari 2023 Kabupaten Pasaman Barat sudah berusia 19 tahun setelah mekar dari Kabupaten Pasaman pada tahun 2004.

Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan pemilihan kepala daerah sebanyak empat kali sejak tahun 2005-2020. Pemilihan kepala daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 dimenangkan oleh pasangan Hamsuardi dan Risnawanto dapat mengalahkan petahana Yulianto. Pemilihan yang dilakukan tahun 2015 juga diikuti oleh Hamsuardi dengan pasangannya Kartuni. Pemilihan yang dilaksanakan tahun 2015 memiliki tiga pasangan calon. Pasangan nomor urut 01 yaitu Hamsuardi dan Kartuni dengan partai pengusung Hanura, PAN, dan PKS. Pasangan nomor urut 02 yaitu Zulkenedi Said dan Risnawanto dengan partai pengusung Golkar, NasDem, dan PDI-P. Pasangan nomor urut 03 yaitu Syahrian dan Yulianto dengan partai pengusung Gerindra dan Demokrat. Berikut hasil rekapitulasi suara masing-masing pasangan calon pilkada tahun 2015.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pilkada Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih (DPT)	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Paslon 01	Suara Paslon 02	Suara Paslon 03
1	Sungai Beremas	15.403	7.929	217	2.225	2.298	3.406
2	Lembah Melintang	29.766	17.908	388	9.395	1.408	7.105
3	Pasaman	42.867	25.450	613	5.196	10.587	9.667
4	Talamau	19.218	10.460	325	2.532	5.337	2.591
5	Kinali	39.708	23.267	617	5.719	9.911	7.637
6	Gunung Tuleh	14.928	10.241	160	1.965	2.827	5.449

7	Ranah Batahan	17.349	11.948	295	2.137	2.746	7.065
No	Kecamatan	Jumlah Pemilih (DPT)	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Paslon 01	Suara Paslon 02	Suara Paslon 03
8	Koto Balingka	18.015	11.471	268	2.889	2.991	5.591
9	Sungai Aur	21.886	13.781	346	6.832	1.752	5.197
10	Luhak Nan Duo	26.486	17.098	420	2.495	9.010	5.593
11	Sasak Ranah Pasisie	9.600	7.186	192	537	5.389	1.260
Total		255.226	156.739	3.841	41.922	54.256	60.561

Sumber: Data Sekunder KPU Pasaman Barat Tahun 2016

Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 cukup menarik perhatian, pasalnya terdapat lima pasangan calon yang maju mencalonkan diri. Pasangan nomor urut 01 yaitu Hamsuardi dan Risnawanto dengan partai pengusung PAN, PKS, dan PDI. Pasangan nomor urut 02 yaitu Maryanto dan Yulisman dengan partai pengusung Gerinda dan PBB. Pasangan nomor urut 03 yaitu Erick Haryanto dan Syawal Suro dengan partai pengusung Golkar, PPP, dan PKB. Pasangan nomor urut 04 yaitu Yulianto dan Syafrial dengan partai pengusung Demokrat dan NasDem. Pasangan nomor urut 05 yaitu Agus Susanto dan Rommy Chandra, berbeda dengan pasangan lainnya, pasangan ini berasal dari golongan independen.

Kemenangan pasangan nomor urut 01 pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 menarik untuk dikaji secara mendalam, pasalnya pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2015 Hamsuardi dan Kartuni tidak dapat menempati posisi perolehan suara tertinggi melainkan mendapatkan perolehan suara terendah, yang dapat dilihat melalui Tabel 1.1 di atas. Berbagai faktor seperti politik identitas/keberadaan etnis, latar belakang pekerjaan masing-masing pasangan calon atau perilaku pemilih, dan patronase politik yang dilakukan oleh setiap pasangan calon mempengaruhi hasil partisipasi politik masyarakat dalam pemilu tahun 2020 di Kabupaten Pasaman Barat.

Perolehan suara dari partisipan yang diperoleh masing-masing pasangan calon menentukan kemenangan kepala daerah yang terpilih, sehingga melakukan analisis terhadap faktor-faktor penyebab pengambil

keputusan dalam menentukan pilihannya dalam pilkada patut untuk dilakukan. Diketahui berdasarkan perhitungan hasil suara pilkada Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 dapat dilihat melalui hasil rekapitulasi suara masing-masing pasangan calon pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pilkada Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih (DPT)	Suara Sah	Suara Paslon 01	Suara Paslon 02	Suara Paslon 03	Suara Paslon 04	Suara Paslon 05
1	Sungai Beremas	16.407	9.263	3.527	1.125	1.644	1.574	1.393
2	Lembah Melintang	29.942	20.993	7.512	1.334	2.948	3.845	5.354
3	Pasaman	44.258	30.660	9.804	3.365	3.762	10.806	2.923
4	Talamau	19.689	12.284	3.536	1.753	1.679	2.808	2.508
5	Kinali	42.862	27.836	5.658	3.974	4.183	12.147	1.874
6	Gunung Tuleh	15.886	11.800	3.378	1.635	1.351	3.533	1.903
7	Ranah Batahan	17.680	13.075	4.911	1.144	1.950	2.932	2.138
8	Koto Balingka	18.634	13.364	4.811	1.083	2.908	2.166	2.396
9	Sungai Aur	20.649	15.462	7.037	1.846	2.414	2.502	1.663
10	Luhak Nan Duo	27.065	18.910	4.933	1.601	2.349	8.567	1.460
11	Sasak Ranah Pasisie	9.582	5.969	1.448	836	1.218	1.610	857
Total		262.654	179.616	56.555	19.696	26.406	52.490	24.469

Sumber: Data Sekunder KPU Pasaman Barat Tahun 2021

Hasil rekapitulasi diatas dapat dilakukan analisis terhadap persebaran hasil suara yang diperoleh setiap pasangan calon pada unit kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Analisis yang digunakan untuk mengetahui persebaran tersebut adalah analisis Koefisien Asosiasi Geografis (KAG) dan *Location Question* (LQ). Melalui analisis KAG persebaran hasil suara dapat diketahui di seluruh daerah penyelenggara pemilu. Sedangkan analisis LQ diperoleh informasi kecamatan mana saja yang menjadi basis dan non basis perolehan suara setiap pasangan calon pilkada di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka akan dilaksanakan penelitian skripsi dengan judul **KAJIAN GEOGRAFI POLITIK TERHADAP HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT**

TAHUN 2020, sehingga dari penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan kepala daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020. Sehingga dari kajian tersebut dapat diketahui distribusi keruangan perolehan suara pasangan calon pilkada Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 dan persebaran daerah basis dan non basis setiap pasangan calon pilkada Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana distribusi keruangan perolehan suara pasangan calon kepala daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020?
2. Bagaimana persebaran daerah basis dan non basis setiap pasangan calon kepala daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020?
3. Apakah faktor politik identitas/keberadaan etnis, perilaku pemilih dan latar belakang masing-masing pasangan calon beserta patronase politik dapat mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan pada pilkada Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020?
4. Tingkat kepuasan masyarakat Pasaman Barat terhadap kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati periode 2021 – 2024?.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui distribusi keruangan perolehan suara pasangan calon kepala daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020.
2. Mengetahui persebaran basis dan non basis setiap pasangan calon kepala daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020.
3. Menganalisis faktor politik identitas/keberadaan etnis, perilaku pemilih, latar belakang, dan patronase politik yang mempengaruhi perolehan suara pemilihan di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020.
4. Menganalisis tingkat kepuasan masyarakat Pasaman Barat terhadap kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati periode 2021 – 2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Instansi

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan instansi Kabupaten Pasaman Barat mengenai hasil pemilihan kepala daerah dan membantu para aktor politik dalam menyusun strategi kampanye di setiap wilayah yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi hasil distribusi suara pilkada Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 beserta analisisnya sebagai pertimbangan dalam melakukan pilkada yang akan datang oleh masyarakat.

3. Bidang Akademis

Sebagai salah satu bentuk implementasi dari ilmu geografi politik untuk kajian pemilihan kepala daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020.

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1 Telaah Pustaka

A. Geografi Politik

Geografi politik berasal dari geografi manusia yang terkait dengan kepentingan militer sebagai konsekuensi politis hubungan antara geografi fisik dan geografi sosial dalam suatu wilayah negara. Geografi politik mempunyai asosiasi dekat dengan geografi regional, dengan fokusnya terhadap karakteristik yang unik, dan determinisme lingkungan dengan penekanannya atas pengaruh lingkungan fisik pada aktivitas manusia. Kutipan Abdurachmat dari Robinson dalam (Sri Hayati & Ahmad Yani, 2007) menerangkan bahwa geografi politik merupakan analisis hubungan antarnegara serta analisis terhadap hubungan dan adaptasi internal dari kondisi suatu lingkungan tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas, terdapat tiga ruang lingkup dalam geografi politik yaitu hubungan antar lingkungan/daerah (*Environmental Relations*), kekuatan negara (*National Power*), dan daerah politik (*Political Region*). Hubungan antar lingkungan/daerah (*Environmental Relations*)

menekankan pada kajian perbedaan dan keragaman wilayah pada suatu negara dan penduduk yang mendiaminya. Kekuatan negara (*National Power*) menekankan pada masalah pengaruh atau kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara. Sedangkan daerah politik (*Political Region*) membahas terkait pembagian wilayah administrasi, batas negara, dan masalah yang berhubungan dengan pengawasan wilayah kekuasaan negara.

Hubungan antara geografi dan politik dapat ditarik kesimpulan melalui pengertian geografi politik. Geografi politik merupakan cabang dari geografi manusia yang mempelajari aspek keruangan, pemerintahan atau kenegaraan yang ada di permukaan bumi (Sumaatmadja dalam Alfandi, 2002). Pendekatan dalam geografi politik untuk mempelajari objek studinya dapat menggunakan pendekatan historis, faktual, fungsional, dan *relationship* (Sri Hayati & Ahmad Yani, 2007).

- Pendekatan historis, merupakan pendekatan yang menerangkan tentang negara yang didasarkan pada asal mula dan perkembangan suatu negara, yang mana dapat dimanfaatkan untuk mempelajari negara sebagai kasus individual.
- Pendekatan faktual, merupakan pendekatan yang digunakan untuk mempelajari kenyataan-kenyataan kehidupan politik pada suatu negara dengan berbagai unsur geografisnya seperti luas, bentuk wilayah, iklim, sumber daya dan penduduk [Valkenburg, dalam (Abdurachmat, 1982)].
- Pendekatan fungsional, merupakan pendekatan yang mempelajari tentang cara suatu negara untuk membina dirinya sendiri. Melalui pendekatan ini dipelajari juga kekuatan-kekuatan yang bersifat nonpolitis seperti iklim, pegunungan, penyebaran penduduk yang tidak merata, pengaruh faktor fisik dan manusia terhadap aktivitas politik negara, pengaruh aspek-aspek politik yang dilaksanakan terhadap aspek lainnya, hubungan luar negeri dan tingkat ketergantungan suatu negara terhadap negara lain.
- Pendekatan *Relationship*, merupakan pendekatan yang menekankan pada hubungan faktor lingkungan (alam) dengan aspek politik yang

digunakan untuk mengkaji kemakmuran suatu negara yang dapat dilihat dari ketersediaan faktor sumber daya alam. Perhitungan kekayaan alam yang dimiliki suatu negara menjadi dasar kesadaran suatu bangsa untuk mempertahankan sehingga dapat melangsungkan kehidupan.

Menurut Alfandi (2002) hubungan antara geografi politik dengan geopolitik, yang bersifat multidisipliner yang mencakup beberapa perihal sebagai berikut:

- Aspek sosial, kompleks wilayah, sistem ekologi, spasio-temporal, letak, batas, lusa, bentuk, posisi ibukota negara, iklim dalam wilayah, taksonomi negara, regionalisme, sistem ketatanegaraan, analisis sistem kegiatan-ruang-waktu, daya tampung dan daya dukung wilayah, termasuk perluasaaan ruang (*lebensraum*).
- Sikap dan kepentingan negara yang tercermin pada situasi konflik dan ancaman (poliyik, sosial-ekonomi, militer) serta pemecahan masalah atau kerjasama regional dan internasional.
- Hubungan kepentingan ekonomi (ekspor-impor) dan hubungan hankam (pekta militer), kepentingan ekonomi internal (distribusi dan pengolahan SDA), dan SDM.
- Kondisi internal dan eksternal jumlah dan penyebaran penduduk, kepadatan penduduk, perbedaan dan kesatuan bahasan, variabilitas kelompok etnis, keragaman agama dan jumlah serta kualitas pemeluknya, pola fikir yang terbentuk yang diakibatkan sejarah masa lalu, dan budaya.
- Kepentingan ideologi politik, sistem organisasi ekonomi, dan pakta militer.
- Kebijakan politik dalam dan luar negeri, aspek wilayah dari ilmu poliyik dan hukum internasional.

Menurut Peter Tylor dan Ronal Jhonston yang dikutip dari Glasnner (1993) dalam Gunardo (2014) menjelaskan tiga pokok pikiran dalam kajian *electoral geografi*, yaitu: 1). *Geographic of Voting*, merupakan studi yang menjelaskan pola-pola persebaran suara setelah suatu pemilihan umum

dilaksanakan, dimana dalam analisisnya menggunakan metode statistik atau formula statistik untuk mendeskripsikan atau mengilustrasikan perolehan suara. 2). *The Geography Influences on Voting* dalam sudut pandang geografi terdapat empat aspek yang mempengaruhi suatu pemilihan, isu-isu yang digilirkan pada saat pemungutan suara; pemungutan suara untuk pasangan calon; pengaruh kampanye ketika pemilihan; dan hal paling mendasar adalah “*the neighborhood effect*”, merupakan hubungan antara hasil pemilihan dengan tempat kediaman atau daerah tempat tinggal pasangan calon. 3). *The Geography of Representation* dalam memilih kepala daerah, berdasarkan jumlah pemilih atau distrik. Jumlah distrik dan batasannya sangat mempengaruhi kompetisi bagi para pasangan calon pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan penjelasan *electoral geography*, hasil pemungutan suara dapat dipetakan berdasarkan wilayah. Terdapat variasi perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya terhadap wilayah pemilihan. Beberapa daerah atau wilayah pemilihan konsisten dalam memilih salah satu partai politik tanpa memperhatikan isu-isu politik atau pasangan calon yang berkaitan dengan partai yang dipilih oleh pemilih. Analisis dalam pemungutan suara dapat dilakukan pada skala wilayah kabupaten/kota dengan menggunakan teknik *mapping analysis*. Pada penjelasan *electoral geography* terdapat sejumlah faktor-faktor yang berpengaruh dalam memperoleh suara, yaitu beberapa aspek sosiologi diantaranya kondisi sosial, ekonomi, jenis kelamin, kepercayaan, dan ras.

B. Pemilu dan Pilkada di Indonesia

Menurut UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan umum menurut Sulastomo dalam Gunardo (2014), mengatakan bahwa pemilihan umum adalah proses awal kehidupan yang demokratis. Pada kajian geografi politik

pemilu menekankan pada lingkup pembahasan wilayah (tradisional) dan pendekatan spasial (perilaku) terhadap pemilihan umum. Pemilihan umum (pemilu) merupakan agenda politik yang rutin dilaksanakan lima tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD dan memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati.

Pemilihan umum di Indonesia pertama kali dilaksanakan tahun 1955 pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, dengan tujuan pemilihan anggota Dewan Konstituante atau yang dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan perkembangan dari amandemen UUD 1945 pemilu di Indonesia dilakukan selain pemilihan DPR, DPD, dan DPRD juga dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan memilih kepala daerah. Pemilihan kepada daerah (pilkada) saat ini dilakukan secara langsung.

Pemilihan kepala daerah secara langsung telah dilaksanakan sejak tahun 2005, merujuk kepada ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 yang berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 untuk menetapkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan yang berada pada daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih oleh pemilih secara demokratis. Proses percepatan demokrasi secara beruntun yang kurang lebih lima tahun terhitung dari 1 Juni 2005 ternyata menyisakan banyak persoalan. Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung ternyata berkontribusi menambah beban politik, bahkan beban finansial negara ini. Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung dinilai terlalu boros dikarenakan tidak seimbang dengan *cost* politik yang telah dikeluarkan oleh negara.

Pemilihan kepala daerah seringkali menimbulkan permasalahan atau kecurangan misalnya terkait korupsi. Korupsi setelah pemilihan kepala daerah sangat *massif* (besar) dan tersangkanya seringkali dilakukan oleh kepala daerah yang telah dipilih oleh masyarakat. Tapi disisi lain pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung memiliki sejumlah

kelebihan dibandingkan pemilihan melalui lembaga perwakilan DPRD. Kelebihan-kelebihan yang dimaksud antara lain:

- Dapat mengurangi arogansi DPRD karena mereka sebagai satu-satunya lembaga yang merepresentasikan rakyat, karena pemilihan kepala daerah secara langsung akan menempatkan kepala daerah sebagai representasi masyarakat lokal.
- Dapat membatasi pengaruh konfigurasi politik DPRD kepada kepala daerah, sehingga akuntabilitas publik kepala daerah tidak lagi ditentukan oleh DPRD tetapi oleh masyarakat daerah itu sendiri.
- Dapat menjamin terciptanya legitimasi pemerintahan daerah, jadi pemerintahan daerah menjadi lebih afektif.
- Dapat mengurangi praktek *politics money* dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah sehingga pada proses laporan pertanggung jawaban, kepala daerah terhindar dari hal tersebut.

C. Partai Politik dan Koalisi Partai Politik

Menurut Ramlan Surbakti dalam Gunardo (2014) mengatakan, partai politik merupakan sekelompok anggota yang terorganisir dengan rapi dan stabil sehingga bisa dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum sebagai alternatif kebijakan umum yang mereka susun. Partai politik merupakan sebuah organisasi politik yang terdiri atas beberapa anggota yang tujuannya untuk mencapai kekuasaan politik, sebagai lembaga politik, dan partai politik bukanlah sebagai sesuatu yang muncul dengan sendirinya. Partai politik memiliki hubungan dengan sisten sosial politik yang berfungsi sebagai sarana dalam bersosialisasi politik, berkomunikasi politik, rekrutmen politik, dan sebagai instrumen penyalur aspirasi masyarakat. Seringkali, apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui Undang-Undang terjadi perbedaan dengan praktek dan hasilnya.

Hingga saat ini partai politik banyak bermunculan semenjak era reformasi yang dibentuk atas dasar persamaan kehendak melalui pemilihan umum, dan otomatis kader-kader yang berada pada masing-masing partai politik berasal dari berbagai macam kepentingan dan latar belakang yang berbeda-beda. Apabila dikaitkan dengan antara sistem presidensial dengan sistem multipartai yang ada, hal tersebut menjadi sebuah realitas politik yang menarik untuk dikaji, pada pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung seharusnya dapat menjadi perwujudan yang tegas dari sistem presidensial, tetapi tidak dapat terlepas dari pengaruh partai politik, terutama yang terjadi pada partai-partai politik yang berkoalisi.

Pemilihan kepala daerah pada pemilihan memiliki pendekatan yang berbeda karena dalam pelaksanaan pilkada setiap pasangan calon harus memiliki syarat minimal dukungan partai politik yang dapat dihitung dari jumlah kursi DPRD atau suara sah partai politik pada hasil pemilu legislatif. Penjelasan di atas diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 40 tentang bahwa setiap pasangan calon atau kandidat peserta pilkada harus memiliki dukungan dari partai politik yang akan mengusungnya yang memiliki sekurang-kurangnya 20% dari kursi DPRD atau 25% dari suara sah. Apabila pasangan calon yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah memiliki syarat dukungan dari partai politik yang kurang dari apa yang sudah ditentukan, maka disarankan untuk membangun koalisi partai politik.

Koalisi partai politik merupakan upaya yang dilakukan untuk menggabungkan beberapa partai politik untuk memperoleh suara terbanyak untuk menghindari konflik yang terjadi antara partai politik saat pemilihan kepala daerah dilaksanakan (Abdar, 2018). Seperti yang diketahui partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan kemenangan pasangan calon pemilihan kepala daerah yang diusung karena faktor estimasi jumlah pendukung yang diperoleh dari koalisi partai politik.

D. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan salah satu ciri khas modernisasi politik dan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat yang menghasilkan partisipasi yang lebih jelas. Partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh masyarakat (Miriam, 1993). Masyarakat atau pemilih yang ikut serta berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu terdorong karena keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama kepentingan mereka dapat tersalurkan atau setidaknya diperhatikan. Masyarakat yang berpartisipasi memilih percaya bahwa kegiatan mereka memiliki efek, dan efek tersebut dinamakan *political efficacy*. Semakin banyaknya partisipasi masyarakat, maka pelaksanaan demokrasi semakin baik.

Semakin tinggi tingkat partisipasi dari masyarakat mengikuti dan memahami masalah politik dan turut atau ingin melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik. Sebaliknya, apabila tingkat partisipasi politik masyarakat rendah, maka terdapat indikasi bahwa pelaksanaan demokrasi yang dilaksanakan di suatu negara yang memberikan tanda yang kurang baik. Masyarakat kurang atau bahkan sama sekali tidak berminat untuk masalah-masalah pemilu dan ketatanegaraan lainnya. Bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Cohen dan Uphoff (1997) dikutip dalam Kaho (2000:57) sebagai berikut: a) partisipasi dalam pembuatan keputusan; b) partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan; c) partisipasi dalam pemanfaatan hasil; dan d) partisipasi dalam evaluasi.

Sedangkan Sulaiman dalam Sastropetro (1998), merumuskan bahwa bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut: a) partisipasi dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka; b) partisipasi dalam bentuk iuran uang, barang, dan prasarana; c) partisipasi dalam proses pengambilan keputusan; dan d) partisipasi dalam bentuk dukungan. Jenis-jenis partisipasi politik menurutnya adalah sebagai berikut: a) partisipasi pikiran (*psychological participation*); b) partisipasi tenaga (*physical participation*); c) partisipasi pikiran dan tenaga (*psychological and physical participation*);

d) partisipasi barang (*material participation*); dan e) partisipasi uang/dana (*money participation*).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan suatu kegiatan seseorang atau sekumpulan orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan cara memilih pemimpi negara dan secara langsung atau tidak langsung sehingga dapat mempengaruhi pemerintah. Menurut Nimmo (2000) keterlibatan seseorang dalam partisipasi politik dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini:

- Peluang resmi, maksudnya adalah terdapat kesempatan seseorang yang terlibat dalam partisipasi politik karena didukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara.
- Sumber daya sosial, maksudnya adalah ditentukan oleh kelas sosial dan terdapat perbedaan geografis. Tetapi pada kenyataannya tidak semua orang memiliki peluang atau kesempatan yang sama berkenaan dengan sumberdaya sosial dan sumberdaya ekonomi untuk terlibat dalam partisipasi politik. Sehingga dengan perbedaan demografis, terdapat perbedaan dalam partisipasi seperti usia, jenis kelamin, suku, tempat tinggal, agama, dll.
- Motivasi personal, maksudnya adalah motif yang mendasari kegiatan berpolitik sangat bervariasi. Motif ini sengaja atau tidak sengaja, rasional atau tidak emosional, diilhami psikologis atau sosial, diarahkan dari dalam diri sendiri atau dari luar dan dipikirkan atau tidak dipikirkan.

E. Perilaku Politik

Perilaku politik merupakan perilaku yang dilakukan oleh insan atau individu atau sekelompok orang untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai insan politik (Gunardo, 2014). Perilaku politik juga sebagai salah satu unsur atau aspek perilaku secara umum. Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan yang nyata seperti pemberian suara, protes, lobi, dan sebagainya. Sikap politik merupakan hubungan antara keyakinan yang

melekat sehingga mendorong seseorang untuk menanggapi suatu objek atau situasi politik dengan cara tertentu.

Biasanya sikap dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh proses dan peristiwa historis kejadian yang sudah berlalu yang merupakan suatu kesinambungan yang berubah. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat perilaku pemilih dalam pemilu atau pilkada dengan menggunakan pendekatan *voting behavior* (perilaku pemilih). Dieter Roth dalam Miaz (2012), menjelaskan bahwa terdapat tiga macam pendekatan atau dasar pemikiran yang menerangkan perilaku pemilu, yaitu penekatan sosiologis atau sosial struktural, model psikologi sosial, dan model pilihan rasional.

Pertama, pendekatan sosiologi atau sosial struktural merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya hal yang berkaitan dengan instrumen kemasyarakatan seseorang seperti, (a) status sosial ekonomi (seperti pendidikan, jenis kelamin, jenis pekerjaan, pendapatan, dan kelas), (b) agama, (c) etnik, dan (e) wilayah tempat tinggal (seperti kota, desa, pesisir, atau pedalaman). *Kedua*, pendekatan psikologis atau psikologi sosial merupakan persepsi dan penilaian pribadi terhadap pasangan calon atau kandidat yang mempengaruhi pilihannya dalam pemilu atau pilkada. *Ketiga*, pendekatan pilihan rasional atau *rational choize* merupakan pemilih pada dasarnya bertindak rasional pada saat membuat pilihan dalam TPS (Tempat Pemungutan Suara), tanpa mengira agama, jenis kelamin, kelas, latar belakang orang tua, dan latar belakang lainnya yang bersifat eksternal.

Branscomber dan Byrne dalam Miaz (2012), menjelaskan bahwa *heuristics* merupakan cara mudah untuk mencapai keputusan yang kompleks atau membuat kesimpulan, dalam waktu yang singkat dan efisien. Terdapat lima jenis *heuristics* yang bisa digunakan individu dalam membantu dirinya dalam pengambilan keputusan politik, khususnya pada saat pemilu (perilaku pemilih). Berikut penjelasan lima jenis *heuristics* tersebut:

- *Affect referral*, menjelaskan bahwa individu akan memilih pasangan calon atau kandidat yang paling menarik secara emosional atau yang lebih disukainya (emosional).
- *Endorsement*, menjelaskan bahwa individu akan memilih kandidat sesuai dengan rekomendasi dari kerabat dekat, elit politik yang terpercaya, ataupun kelompok-kelompok sosial yang dimiliki oleh individu. Jadi individu membiarkan orang lain di luar dirinya yang memutuskan pilihan.
- *Familiarity*, merupakan individu yang memilih kandidat yang telah dikenal sebelumnya.
- *Habit*, merupakan individu yang memilih kandidat berdasarkan pilihan pada pemilihan umum sebelumnya dan tetap pada pilihannya tersebut.
- *Viability*, merupakan individu yang memilih kandidat yang mempunyai peluang menang lebih besar.

F. Politik Identitas

Kedaulatan rakyat pada pemilihan kepala daerah telah membangkitkan fakta sosiologis dengan munculnya politik identitas yang ditampilkan oleh calon kepala daerah dengan keetnisan, dan bagi pemilih (perilaku politik) menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihannya (Hemay, et.al, 2016: 1738). Politik identitas dalam konteks teori dipahami sebagai sesuatu yang bersifat hidup dalam setiap etnis, pada kenyataannya keberadaan politik identitas ini bersifat tersembunyi dan kuat, sehingga kadangkala dapat memunculkan kekuatan politik yang menguasai.

Pertentangan yang terjadi antara identitas nasionalisme dan identitas agama saat ini semakin mengerucut hingga dapat mengganggu stabilitas negara. Pertentangan yang terjadi antara keduanya menimbulkan isu dan menjadi perpecahan. Perbedaan politik identitas di Indonesia menjadi penting untuk dikaji sebagai upaya untuk menarik benang merah dari perbedaan yang ada sehingga kestabilan politik tetap terjaga. Politik

identitas sendiri merupakan penjabaran dari identitas politik yang dianut oleh warga negara yang berkaitan dengan arah politiknya.

Kemunculan politik identitas dalam dinamika politik yang sangat beragam di Indonesia tidak terlepas dari adanya rasa ketidakadilan dan persamaan hak yang diklaim oleh masing-masing sekumpulan golongan sosial tertentu. politik identitas yang ada di daerah juga berpengaruh terhadap minoritas, karena aktor minoritas dapat mempengaruhi serta memobilisasi kelompok mayoritas dengan cara menjalin hubungan terhadap kelompok lain. Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pasaman Barat salah satunya juga dipengaruhi oleh politik identitas. Kabupaten Pasaman Barat didiami oleh tiga etnis yang berbeda yaitu, Minangkabau, Mandailing, dan Jawa. Berdasarkan presentase Minangkabau 40%, Mandailing 40% dan Jawa 20%.

G. Patronase Politik

Patronase berarti sebagai pendistribusian berbagai sumber daya yang berharga, yaitu berupa pensiun, lisensi, atau kontrak publik berdasarkan kriteria politik, dan patron yang memiliki kekuasaan serta ingin mempertahankan (Sherly, 2020). Patronase merupakan hubungan dua arah antara patron dan klien, yang dimaksud dengan patron adalah individu ataupun kelompok yang memiliki sumberdaya berupa materil dan non-materil dibandingkan dengan kline, sedangkan yang dimaksud dengan sumberdaya adalah aktor yang memiliki kontrol dan kepentingan tertentu. Patronase politik dimaknai hubungan antara patron dan klien dalam ruang lingkup atau dinamika politik, dan hubungan dua arah antara elite partai politik dengan pemilih atau pastisipan politik, pegiat kampanye, birokrasi pemerintahan ataupun organisasi yang ada di masyarakat dengan adanya tujuan untuk kepentingan-kepentingan.

Biasanya patronase politik yang diberikan itu berupa uang, barang atau benda, pelayanan atau servis jasa, dan peluang ekonomi. Patronase politik bisa dibagi dalam kategori sebagai penerima dan pemberi: sebagai

penerima seperti individu, golongan, komunitas berdasarkan wilayah geografis. Sedangkan sebagai pemberi seperti individu atau golongan yang memiliki sumber daya di atas rata-rata. Patronase politik terjadi sebelum dan saat pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum (pemilu) dan juga sesudah pelaksanaan pemilihan. Patronase politik terjadi di luar dari yang sudah disebutkan sebelumnya adalah: seperti pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan dalam birokrasi pemerintahan.

Partai politik saat ini cenderung melakukan hubungan patronase politik dengan siapapun, dengan alasan untuk meraih suara mayoritas dan kemenangan. Hubungan patronase politik semakin lama semakin meluas dalam dinamika politik, terjadi di wilayah lain yaitu pada saat pemilihan kepala daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020.

H. Kepuasan Masyarakat

Kepuasan Masyarakat merupakan perasaan yang menggambarkan perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil berupa produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan oleh masyarakat (Idris, 2007). Apabila kinerja kepemimpinan pemerintah memenuhi harapan maka masyarakat puas. Apabila kinerja pemerintah melebihi harapan menjadikan masyarakat terasa puas atau senang. Maksudnya kepuasan masyarakat merupakan tingkat perasaan yang dirasakan masyarakat itu sendiri setelah membandingkan kinerja yang ia rasakan, dibandingkan dengan harapannya. Menurut Moenir (2010) dampak dari kepuasan masyarakat dapat terlihat pada:

- a) Masyarakat menghargai pegawai yang bertugas pada bidang pelayanan umum.
- b) Masyarakat akan terdorong mematuhi aturan dengan penuh kesadaran tanpa prasangka buruk, jadi lambat laun akan dapat membentuk sistem pengendalian diri yang efektif.
- c) Adanya rasa bangga pada masyarakat atas karya pegawai pada bidang layanan umum.

- d) Ketelodaran pegawai yang ditemui dapat dihindarkan dan ditiadakan.
- e) Karena adanya kelancaran pada bidang pelayanan umum, usaha dan inisiatif dari masyarakat akan meningkat.

Kepuasan masyarakat dapat dilakukan survei agar dapat mengetahui sejauh mana kinerja yang dilakukan oleh layanan pemerintah. Kepuasan Masyarakat menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmenpan) Nomor 25 Tahun 2004 merupakan hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik. Survei Kepuasan dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi melalui responden dengan menggunakan kusioner. Pada penelitian ini dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati dengan 10 unsur dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat.

1.5.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya ditambahkan untuk menjelaskan referensi baik bersumber dari Skripsi atau Jurnal yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian skripsi ini. Terdapat persamaan dan perbedaan yang dapat dilihat dari judul, tujuan, metode, dan hasil penelitian yang secara jelas tersaji pada tabel di bawah ini

- a. Penelitian **Aghnia Salsabila (2021)** berjudul “Kajian Geografi Politik Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020”. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini terletak pada analisis dan metode penelitian yang digunakan, unit penelitian, dan tahun penelitian. Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini terletak pada faktor apa saja yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pemilihannya. Terdapat beberapa perbedaan terhadap hasil penelitian.
- b. Penelitian **Dwi Heriyanto (2019)** berjudul “Kajian Geografi Politik pada Wilayah Terdampak Program Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah”. Persamaan penelitian tersebut dengan

penelitian saat ini terletak pada analisis dan metode yang digunakan. Sedangkan, untuk perbedan penelitian ini dengan penelitian saat ini terletak pada hasil penelitian, unit penelitian yang dibahas dimana penelitian ini membahas tentang pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten sedangkan penelitian tersebut unitnya pada provinsi terhadap hasil pemilihan presiden.

- c. Penelitian **Anggi dkk (2018)** berjudul “Kajian Geografi Politik Tentang Hasil Pemilihan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018”. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini terletak pada unit lokasi penelitian yaitu tingkat kabupaten. Sedangkan, untuk perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini terletak pada metode yang digunakan dan hasil penelitian.
- d. Penelitian **Dita dkk (2015)** berjudul “Kajian Geografi Politik Terhadap Perubahan Perolehan Suara Partai Demokrat Pada Pemilu 2009 dan 2014 di Kabupaten Pacitan”. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini terletak pada unit lokasi penelitian dan metode yang digunakan. Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini terletak pada pokok bahasan dimana penelitian ini membahas tentang perolehan suara terhadap pemilihan kepala daerah sedangkan penelitian tersebut membahas tentang perubahasan suara terhadap partai politik. Perbedaan lain pada kedua penelitian ini adalah terletak pada hasil penelitian dan juga tujuan dari penelitian.
- e. Penelitian **Afief (2013)** berjudul “Analisis Keruangan Basis Pemilihan Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2004 dan 2009 di Kabupaten Magelang”. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini terletak pada unit lokasi penelitian. Sedangkan, untuk perbedaan pada kedua penelitian ini terletak pada metode yang digunakan, tahun yang digunakan, hasil penelitian beserta tujuan dari penelitian.

Tabel 1.3 Ringkasan Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Aghnia Salsabila (2021)	Kajian Geografi Politik Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui beragam latar belakang setiap Paslon peserta Pilkada Kabupaten Purworejo tahun 2020 2. Mengetahui isu-isu politik yang terjadi selama masa kampanye pilkada Kabupaten Purworejo pada tahun 2020 3. Mengetahui distribusi perolehan suara dan basis kantong suara untuk setiap kandidat calon kelapa daerah Kabupaten Purworejo pada pilkada tahun 2020 4. Mengetahui faktor-faktor yang paling mempengaruhi pemilihan dalam memilih kandidat calon kepala daerah Kabupaten Purworejo pada pilkada tahun 2020 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis deskriptif untuk menjelaskan isu-isu politik yang terjadi selama masa kampanye pilkada Kabupaten Purworejo Tahun 2020 2. Analisis Koefisien Asosiasi Geografis (KAG) 3. Analisis <i>Local Quetient</i> (LQ) 4. Analisis deskriptif untuk menjelaskan faktor-faktor yang paling mempengaruhi pemilihan dalam memilih kandidat calon kepala daerah Kabupaten Purworejo pada Pilkada Tahun 2020 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deskripsi isu-isu politik yang terjadi selama masa kampanye pilkada Kabupaten Purworejo Tahun 2020 2. Peta Distribusi Perolehan Suara Setiap Kandidat Peserta Pilkada Kabupaten Purworejo Tahun 2020 3. Peta Basis dan Non-Basis Perolehan Suara Setiap Kandidat Peserta Pilkada Kabupaten Purworejo Tahun 2020 4. Deskripsi kondisi sosial dan perekonomian masyarakat, yang mempengaruhi keputusan pemilih dalam memilih kandidat calon kepala daerah Kabupaten Purworejo pada pilkada tahun 2020
Dwi Heriyanto (2019)	Kajian Geografi Politik pada Wilayah Terdampak Program Pembangunan Jalan Tol Trans-Jawa di Provinsi Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui distribusi perolehan suara pilpres 2019 pada wilayah terdampak pembangunan Tol Trans Jawa di Jawa Tengah 2. Mengetahui perubahan kantong basis suara pilpres 2019 pada wilayah terdampak pembangunan Tol Trans Jawa di Jawa Tengah 3. Mengetahui hubungan antara pembangunan jalan tol dengan perekonomian masyarakat 	Analisis deskriptif komparatif yang menggunakan data primer dan sekunder, dengan teknik analisis Koefisien Asosiasi Geografi (KAG), <i>Local Quetient</i> (LQ), dan <i>Indepth Interview</i> untuk analisis data kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta perolehan suara pilpres 2019 pada wilayah terdampak pembangunan tol trans-jawa di Jawa Tengah 2. Peta Perubahan Perolehan Suara pilpres 2014 dan 2019 pada wilayah terdampak pembangunan tol trans-jawa di Jawa Tengah 3. Peta Perubahan Basis Perolehan Suara Patahana pada pilpres 2014 dan 2019 di wilayah terdampak pembangunan tol trans-jawa di Jawa Tengah

		pada wilayah terdampak pembangunan Tol Trans Jawa di Jawa Tengah.		4. Deskripsi kondisi sosial dan perekonomian masyarakat di wilayah terdampak pembangunan tol trans-jawa di Jawa Tengah
Anggi Pradana Wiranata, Rahmanelli, Yudi Antomi (2018)	Kajian Geografi Politik Tentang Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui distribusi keruangan perolehan suara pasangan calon kepala daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2015 2. Mengetahui faktor sosiologis pemilih pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Solo Selatan tahun 2015 	Analisis deskriptif kualitatif dengan metode <i>mixed methods</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Distribusi Kemenangan Pasangan Calon pada Pilkada Kabupaten Solok Selatan tahun 2015 2. Deskripsi faktor sosiologis pemilih
Dita Setya Budi P, Luthfi Mutu'ali (2015)	Kajian Geografi Poltik Terhadap Perubahan Perolehan Suara Partai Demokrat Pada Pemilu 2009 dan 2014 Kabupaten Pacitan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui distribusi perubahan sebaran dan perolehan suara Partai Demokrat 2. Mengetahui perubahan kantong suara Partau Demokrat 3. Mengetahui hubungan antara faktor geografi dengan perolehan suara 	Analisis deskriptif menggunakan metode Koefisien Asoisasi Geografi, <i>Local Quetion (LQ)</i> , analisis korelasi, <i>indepth interview</i> untuk analisis data kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tabel distribusi perolehan suara partai demokrat tahun 2009 dan 2014 2. Tabel perubahan perolehan suara partai demokrat 3. Peta basis dan no-basis partai dmeokrat tahun 2009 dan 2014 4. Deskripsi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perolehan suara partai demokrat
Afief Bagus Wicaksono (2013)	Analisis Keruangan Basis Pemilihan Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2004 dan 2009 di Kabupaten Magelang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui distribusi keruangan perolehan suara partai politik basis massa islam dan nasionalis pada pemilu 2004 dan 2009 2. Mengetahui keterkaitan perolehan suara partai politik dengan kondisi sosiologis dan demografis masyarakat 	Pendekatan kualitatif yang didukung data kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Hasil Pemilu 2004 di Kabupaten Magelang 2. Peta Hasil Pemilu 2009 di Kabupaten Magelang 3. Deskriptif faktor sosiologi terhadap perolehan suara di Kabupaten Magelang
Vina Mauriza – Penelitian saat ini (2023)	Kajian Geografi Politik Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui distribusi keruangan perolehan suara pasangan calon kepala daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020. 2. Mengetahui persebaran basis dan non basis setiap pasangan calon kepala 	1. Analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis faktor politik identitas/keberadaan etnis, perilaku pemilih, latar belakang, dan patronase politik yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Distribusi Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Peserta Pilkada Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020. 2. Peta Basis dan Non-Basis Masing-Masing Pasangan Calon Peserta

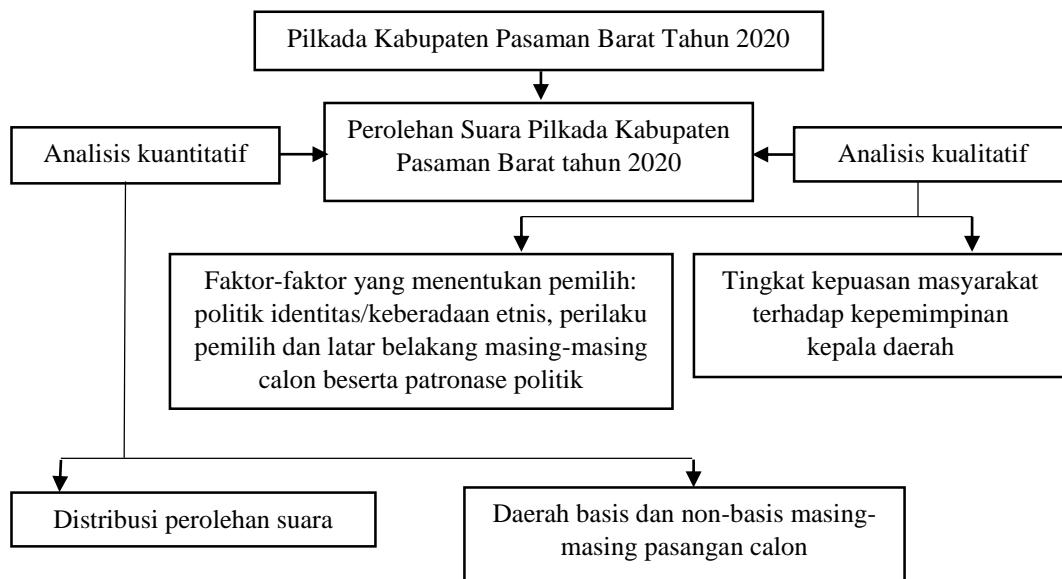
	Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	<p>daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menganalisis faktor politik identitas/keberadaan etnis, perilaku pemilih, latar belakang, dan patronase politik yang mempengaruhi perolehan suara pemilihan di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020. 4. Menganalisis tingkat kepuasan masyarakat Pasaman Barat terhadap kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati periode 2021-2024. 	<p>mempengaruhi perolehan suara pemilihan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Analisis deksriptif kualitatif untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat Pasaman Barat terhadap kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati periode 2021-2024 3. Analisis Koefisien Asosiasi Geografis (KAG) dan Analisis Local Quetient (LQ) untuk analisis data kuantitatif 	<p>Pilkada Pasaman Barat Tahun 2020.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Deskripsi faktor-faktor politik identitas/keberadaan etnis, perilaku pemilih, latar belakang, dan patronase politik yang mempengaruhi perolehan suara pemilihan di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020. 4. Deskripsi tingkat kepuasan masyarakat Pasaman Barat terhadap kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati periode 2021-2024.
--	------------------------------------	---	--	---

Sumber: Pengolahan Data, 2023

1.5 Kerangka Penelitian

Perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 dipengaruhi beberapa faktor, di antara lain latar belakang pekerjaan masing-masing pasangan calon, adanya politik identitas/keberadaan etnis di Kabupaten Pasaman Barat, adanya patronase politik yang terjadi selama masa kampanye hingga saat dilakukan pemilihan kepala daerah. Terdapatnya beberapa faktor yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya selama masa pilkada Kabupaten Pasaman Barat menarik untuk diuji, seberapa besar kaitannya faktor-faktor tersebut mampu mengiring perolehan suara salah satu pasangan calon peserta pilkada Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020. Perolehan suara setiap pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah bisa disebabkan dari latar belakang pasangan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai pemilih sehingga terjadilah patronase politik.

Latar belakang pasangan calon yang berkoalisi dengan beberapa partai politik, latar belakang pekerjaan masing-masing pasangan calon, secara tidak langsung menjadi faktor penentu masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk menentukan pilihannya. Apabila dilakukan analisis terhadap perolehan suara pilkada Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 sehingga didapatkan distribusi perolehan suara, daerah mana yang menjadi basis dan non basis masing-masing pasangan calon. Berikut merupakan diagram alir kerangka penelitian:



Sumber: Pengolahan Data, 2023

Gambar 1.1 Kerangka Penelitian

1.6 Batasan Operasional

Pemilu Pemilihan umum menurut Sulastomo dalam Gunardo (2014), mengatakan bahwa pemilihan umum adalah proses awal kehidupan yang demokratis. Pada kajian geografi politik pemilu menekankan pada lingkup pembahasan wilayah (tradisional) dan pendekatan spasial (perilaku) terhadap pemilihan umum.

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Pemilihan kepala daerah secara langsung telah dilaksanakan sejak tahun 2005, merujuk kepada ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 yang berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 untuk menetapkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan yang berada pada daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih oleh pemilih secara demokratis.

Partisipasi Politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh masyarakat (Miriam, 1993).

Perilaku Politik merupakan perilaku yang dilakukan oleh insan atau individu atau sekelompok orang untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai insan politik (Gunardo, 2014).

Politik Identitas Kedaulatan rakyat pada pemilihan kepala daerah telah membangkitkan fakta sosiologis dengan munculnya politik identitas yang ditampilkan oleh calon kepala daerah dengan keetnisan, dan bagi pemilih (perilaku politik) menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihannya (Hemay, et.al, 2016: 1738).

Ptronase Politik ,Patronase berarti sebagai pendistribusian berbagai sumber daya yang berharga, yaitu berupa pensiun, lisensi, atau kontrak publik berdasarkan kriteria politik, dan patron yang memiliki kekuasaan serta ingin mempertahankan (Sherly, 2020).

Kepuasan Masyarakat Kotler (dalam Idris, 2007:48) mengatakan bahwa kepuasan masyarakat merupakan perasaan yang menggambarkan perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul setelah membandingkan kinerja atau hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan oleh masyarakat.